

Pertemuan 9

Pancasila Sebagai Etika Politik

bidang etika politik

- ⦿ Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia disebut etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral.
- ⦿ Etika politik masuk dalam lingkungan filsafat. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dsb.

- ⦿ Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab.
- ⦿ Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif.

- Prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita *the rule of law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan, dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.

Legitimasi kekuasaan

- Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan yaitu dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.

Legitimasi kekuasaan

- Legitimasi kekuasaan meliputi:
 1. Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang negara (kekuasaan negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral.
 2. Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Legitimasi moral dalam kekuasaan

- Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

nilai

- Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
- Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan menggrahkan sikap dan perilaku manusia.
- Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak.

Tiga kategori nilai (Notonogoro)

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian

- Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.
- Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
- Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika)
- Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak.

Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis

- Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila).
- Nilai Praksis adalah pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.

moral

- Moral berasal dari kata *mos (mores)* yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan.
- Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
- Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia.

norma

- Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.
- Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:
 - a. Norma agama, sanksinya dari Tuhan
 - b. Norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
 - c. Norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.
 - d. Norma hukum, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara.

Pancasila Sebagai Sistem Nilai

- Pancasila sebagai system filsafat hakekatnya merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma.
- Suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai yang bersifat mendasar
- Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang fundamental dan universal bagi manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berenegara.

- Pancasila merupakan sistem nilai kebaikan yang di dalamnya terkandung nilai kebenaran dan nilai keindahan, yang terdiri dari nilai dasar:

- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Kerakyatan
- Keadilan

Sementara itu, penjabarannya ada dalam norma-norma kehidupan, yaitu dalam adat-kebiasaan, sopan santun, dan hukum.

Inti Isi Sila-sila Pancasila

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa.
- Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dan bermoral.

- Sila Persatuan Indonesia

Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sosial.

Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama.

- Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah.

Rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, sehingga rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Dalam sila ini terkandung nilai demokratis yang secara mutlak harus dilaksanakan.

- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam sila ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Oleh karena itu, terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.

Nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

- Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
- Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya.

- Sila pertama kedua adalah sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Sila ketiga, empat dan lima adalah nilai-nilai dasar operasional penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan :
 1. Asas legalitas (hukum)
 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis
 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral
- Prinsip-prinsip dasar etika politik dalam realisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan dsenantiasa dilaksanakan secara kolektif diantara kekuasaan eksekutif, legislative maupun yudikatif.
- Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.